



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN TEJAKULA

Jln. Singaraja- Amlapura Desa Tejakula 81173 Telp. (0362) 34 28421  
[www.tejakula.bulelengkab.go.id](http://www.tejakula.bulelengkab.go.id), [email:tejakula@bulelengkab.go.id](mailto:tejakula@bulelengkab.go.id)



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KECAMATAN TEJAKULA TAHUN 2023





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Tejakula Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Tejakula berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Tahunan Kantor Camat Tejakula ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Tejakula, 8 Pebruari 2022





**DAFTAR ISI**

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>I. Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi Kantor Camat Tejakula .....	1
1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan.....	2
<b>II. Rencana Kinerja Tahunan</b> .....	3
2.1. Sasaran/Capaian Program.....	3
2.2. Indikator dan Target Kinerja .....	3
<b>III. Penutup</b> .....	5

Lampiran Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Tejakula Tahun 2023



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Busungbiu sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tejakula Tahun 2023, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Pemerintah Kecamatan Tejakula dalam melaksanakan kegiatannya. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Kecamatan Tejakula, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 bagi Camat Tejakula kepada Bupati.

### **1.2. Struktur Organisasi Kantor Camat Tejakula**

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Camat





2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
  - a. Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
  - b. Kasubbag Perencanaan
3. Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
4. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pembangunan
5. Kasi Sosial Dan Budaya
6. Kasi Kamtib Dan Satpol-PP

### **1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



## II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

### 2.1. Sasaran/Capaian Program

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Kantor Camat Tejakula telah menetapkan sasaran/capaian program yang akan dicapai. Sasaran/Capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng.

Sasaran/Capaian Program menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 (Tahun ke-1).

### 2.2. Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Kantor Camat Tejakula menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Kinerja Tahunan)



### **III. PENUTUP**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Tejakula ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Kantor Camat Tejakula ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT )  
KECAMATAN TEJAKULA  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				URAIAN	kinerja	ANGGARAN (RP)	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN (RP)	
1	2	3	16	17	18	19	20	21		22	23
1	<b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang di limpahkan	90,205,830.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	90,205,830.00	Kasi Yandu
				Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	25,000,000.00	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Laporan	25,000,000.00	
2	<b>MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN</b>	Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	319,056,000.00	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	319,056,000.00	Kasi Sosial Budaya
3	<b>MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DESA YANG BERKUALITAS</b>	Persentase gangguan trantib yang ditindaklanjuti	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	196,317,880.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan	196,317,880.00	Kasi Linmas Trantib
				KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	terlaksananya koordinasi /sinergitas dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang -undangan dan /atau kepolisian negara republik indonesia	114,142,200.00	koordinasi /sinergitas dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang -undangan dan /atau kepolisian negara republik indonesia	Jumlah Laporan koordinasi /sinergitas dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang -undangan dan /atau kepolisian negara republik indonesia	Laporan	114,142,200.00	
4			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dikembangkan dalam kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila	2,400,000.00	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dikembangkan dalam kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila	Laporan	2,400,000.00	
				Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	8,000,000.00	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Laporan	8,000,000.00	
5		Persentase desa dan kelurahan dengan administrasi baik	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	FASILITASI,REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		239,454,740.00			Laporan	239,454,740.00	Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan
					terlaksananya fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	98,238,600.00	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	98,238,600.00	

					Terlaksananya fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11,596,250.00	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	11,596,250.00	
					Terlaksananya fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7,365,000.00	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah yang difasilitasi dalam rangka Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	7,365,000.00	
					Terlaksananya fasilitas pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2,880,000.00	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitas dalam rangka pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	2,880,000.00	
					Terlaksananya fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	5,210,000.00	fasilitas sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	5,210,000.00	
					Terlaksananya Fasilitas pelaksanaan tugas ,fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	17,770,000.00	Fasilitas pelaksanaan tugas ,fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitas dalam rangka pelaksanaan tugas ,fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Dokumen	17,770,000.00	
					Terlaksananya Koordinasi Fasilitas pendampingan desa di Wilayahnya	91,494,890.00	Fasilitas pendampingan desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan hasil Koordinasi pendampingan desa di Wilayahnya	Laporan	91,494,890.00	
					Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	4,900,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Laporan	4,900,000.00	
6		Prosentase pemenuhan penunjang kinerja perangkat daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,805,850.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,805,850.00	Sekretaris Kecamatan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2,604,032,418.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	2,604,032,418.00	
					Terlaksananya Penatausaha dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	150,160,253.00	Pelaksanaan Penatausaha dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	150,160,253.00	
				Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		40,280,000.00				40,280,000.00	
					Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan		Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Paket		
				Administrasi umum Perangkat Daerah							
					Tersedianya Komponen Instansi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	1,500,400.00	Penyediaan Komponen Instansi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1,500,400.00	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	15,000,000.00	
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	129,817,379.00	Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	Paket	129,817,379.00	
					Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	11,697,140.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan	Paket	11,697,140.00	

				Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	4,104,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Dokumen	4,104,000.00	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	16,252,000.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	16,252,000.00	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19,109,205.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	19,109,205.00	
			Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	70,000,000.00	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	47,506,800.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	Laporan	47,506,800.00	
				Tersedianya Jasa Komonikasi,Sumber daya Air dan Listrik	37,388,740.00	PenyediaanJasa Komonikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	37,388,740.00	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,000,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	72,000,000.00	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,631,515.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	36,631,515.00	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak Kenadaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119,517,500.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan ,pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	JumlahKendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yangdi pelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan ,pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	55,177,500.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan ,pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	55,177,500.00	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	4,340,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Unit	4,340,000.00	
				Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60,000,000.00	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diPelihara /diRehabilitasi	Unit	60,000,000.00	
					4,333,625,000.00				4,333,625,000.00	

Tejakula, 8 Pebruari 2022

